

The Implementation of Village Allocation for Community Facilities and Infrastructure in Sukaharja Village, Karawang Regency

Implementasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Sarana dan Prasarana Masyarakat Di Desa Sukaharja Kabupaten Karawang

*Alya Suci, Nesti Hapsari²

¹²Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Keywords:

Xxxxx;
Xxxxx;
Xxxxx;

terdiri dari 3-5 kata kunci yang dipisahkan oleh tanda titik koma (:), juga ditulis dalam bahasa Inggris, 10pt, *Italic*

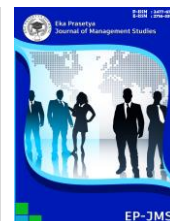
Abstract. Untuk mengetahui, bagaimana Implementasi Anggaran Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana di Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau kejadian. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi". Berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan masih tergolong sangat rendah karena kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkatdesa kepada masyarakat desa sukaharja. Sedangkan tahap pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, yang dimana pengguna anggarandana desa dapat terselesaikan dengan baik dan sudah optimal namun kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada desa yang dilakukan kurang efektif.

Alya Suci*
Email: alyasuci03@gmail.com



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



1. PENDAHULUAN

Pada era otonomi saat ini, pembangunan kini telah dimulai dari pemerintahan terendah yaitu desa. Adapun, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah yaitu menopang dana desa yang mana diperoleh melalui APBN agar dikendalikan melalui rakyat dengan tujuan agar meningkatkan pembangunan serta kemakmuran rakyat desa. Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit hanya 10%. Anggaran lokasi dana desa untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa 30%, dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat hanya 70%.

Tabel 1. 1

Laporan Dana Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur
Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Dana Desa	Realisasi	Lebih/Kurang
2019	940.426.000	940.426.000	0,00
2020	960.019.000	460.303.000	499.716.000
2021	1.065.877.000	375.350.800	581.450.800

Sumber: Kantor Desa Sukaharja

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat yang bervariasi setiap tahunnya. Selain jumlah dana desa yang diterima, tabel 1.1 juga menampilkan jumlah realisasi penggunaan dana desa untuk sarana dan prasarana oleh desa Sukaharja. Realisasi penggunaan dana desa adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun. Realisasi penggunaan dana desa menunjukkan seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis faktor penghambat penggunaan alokasi dana desa serta mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan efektifitas dan efisiensi implementasi penggunaan alokasi dana desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur kabupaten Karawang untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana masyarakat.

2. KAJIAN LITERATUR

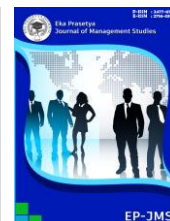
2.1. Pemerintah Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengatur dan mengurus urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa yang disusun oleh kepala



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaranya ditujukan kepada desa.

2.2. Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”. Tujuan dari dilaksanakannya program dana desa yaitu untuk mendorong terwujudnya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dimana pemberdayaan masyarakat menjadi skala prioritas dalam tujuan pemerataan pendapatan.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Namun secara Hukum APBDes merupakan produk hukum desa berupa peraturan desa, dimana merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam Musyawarah Desa. Secara Pokok APBDes yaitu suatu produk perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES). Dari aspek struktur atau komponen, APBDES terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan (M. Nafarin, 2007:11).

2.5. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat, maupun pemerintahan daerah. Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi, maka penerapan akuntansi pada organisasi pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada organisasi perusahaan. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomitersebut, tujuan akuntansi sektor public adalah untuk memberikan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. (Siregar, 2015).

2.4. Sarana dan Prasarana Masyarakat

Sarana dapat dijelaskan segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan. Misalnya sarana yang ada pada kantor desa seperti komputer, meja, kursi, papan tulis, infokus, rak dokumen, dan lain sebagainya. Sedangkan Prasarana yaitu seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan. Adapun proses untuk mencapai tujuan tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek. Misalnya seperti gedung, tanah lapang, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan lain sebagainya (Moenir, 2006).

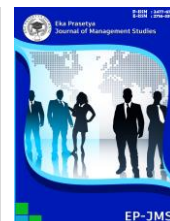
3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokasi penelitian di desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur. Metode kualitatif ini merupakan penjabaran atas suatu permasalahan yang timbul akibat sebuah kebijakan atau tindakan akan hal tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono 2019:18). Data yang diperoleh penulis selama penelitian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori yang pernah dipelajari.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



Di dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara, observasi kepada pihak yang kompeten dalam Implementasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram yang berkaitan dengan implementasi penggunaan dana desa dan laporan realisasi dana desa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling bertujuan (*purposive sampling*) yaitu pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif menggunakan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data seperti pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawin/verivication*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Faktor Penghambat Penggunaan Alokasi Dana Desa

Tabel 1. 1

Laporan Dana Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Tahun Anggaran 2019-2021

Tahun	Dana Desa	Realisasi	Lebih/Kurang
2019	940.426.000	940.426.000	0,00
2020	960.019.000	460.303.000	499.716.000
2021	1.065.877.000	375.350.800	581.450.800

Sumber: Kantor Desa Sukaharja

Berdasarkan hasil wawancara perangkat desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur berkaitan dengan pembangunan desa, maka ada beberapa faktor yang menghambat penggunaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan yang seringkali terjadi, yaitu:

1. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan karena merupakan struktur pemerintahan terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan wewenang yang diberikan pada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan dengan baik, lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat namun terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang baik dan profesional yang menjadi faktor penyebabnya.
2. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar.
3. Belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif.
4. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

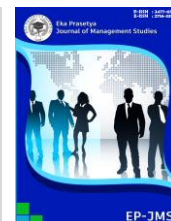
Hasil analisis identifikasi besarnya alokasi Dana Desa yang dilakukan desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur pada tahun 2019-2021 terdapat kelemahan pengelolaan alokasi dana desa yang terletak pada adanya kesalahan dalam memprioritaskan pembangunan fisik sarana dan prasarana penunjang desa dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Sukaharja.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) masih belum sepenuhnya sempurna diterapkan dengan prinsip akuntabilitas. Untuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal teknis



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola. Sehingga masih perlu adanya pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan perubahan aturan setiap tahunnya.

4.2. Efisiensi dan Efektifitas Implementasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan awal Desa Sukaharja bertujuan untuk menyusun kegiatan rencana secara partisipatif sekaligus menetapkan anggaran dana yang telah diterapkan pada daftar rencana kegiatan. Dalam pelaksanaannya Desa Sukaharja melakukan pemanfaatan dana desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa bidang yaitu pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, koperasi dan usaha masyarakat, pemerintahan, bidang pertanian serta pariwisata.

Dalam bidang pendidikan Desa Sukaharja memiliki prasarana untuk mendukung kegiatan pembelajaran meliputi adanya gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK), gedung Sekolah dari Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), serta adanya perpustakaan desa.

Dalam bidang kesehatan di Desa Sukaharja memiliki fasilitas meliputi posyandu, bidan desa, sumber mata air bersih, serta dekatnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Desa Sukaharja memiliki kegiatan aktif yang menjadi kegiatan rutin seperti kegiatan posyandu, aktifnya peranserta kader dan pokjanal desa, adanya pengurus desa siaga aktif.

Sedangkan, untuk menunjang kegiatan serta mobilitas masyarakat di Desa Sukaharja memfasilitasi dengan adanya jembatan penghubung desa, jembatan penghubung antar kecamatan serta adanya jalan lingkungan. Sebagian luas lahan di Desa Sukaharja dimanfaatkan menjadi lahan pertanian penanaman seribu pohon dipinggir jalan, pembudidayaan ikan air tawar, dan penanaman hutan jabon yang hanya sementara.

Desa Sukaharja memiliki sarana keagamaan seperti adanya masjid, mushola serta adanya gereja yang berada di beberapa dusun. Selain itu tersedia sarana olahraga di Desa Sukaharja seperti lapangan sepak bola dan badminton, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sukaharja memiliki koperasi dan usaha masyarakat seperti adanya usaha ayam potong serta usaha pembibitan tanaman. Dan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Sukaharja terdapat adanya suatu perangkat desa lengkap, struktur BPD lengkap serta sarana kantor desa yang cukup memadai.

Selain jumlah dana desa yang diterima, tabel 1.1 juga menampilkan jumlah realisasi penggunaan dana desa untuk sarana dan prasarana oleh desa Sukaharja. Realisasi penggunaan dana desa adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah disusun. Realisasi penggunaan dana desa menunjukkan seberapa efektif dan efisien pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

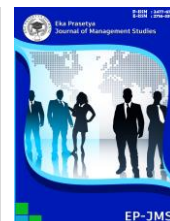
Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penggunaan dana desa untuk sarana dan prasarana digunakan hanya mencapai Rp460.303.000 dan Rp484.426.200, atau sekitar 40,2% dan 44,3% dari jumlah dana yang diterima. Hal ini menimbulkan selisih antara dana desa dan realisasi yang cukup besar, yaitu sebesar Rp499.716.000 pada tahun 2020 dan Rp581.450.800 pada tahun 2021.

Sisa realisasi pada tahun 2020 digunakan untuk bidang pendidikan PAUD/TK/TPA/TPQ, pembangunan/rahabilitasi/pengadaan sarana, pemeliharaan pembangunan, pembangunan jajak desa,



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



pembangunan pariwisata Tk. Desa, bidang kawasan pemukiman pengelolaan sampah, makanan tambahan; kelas bumil; lansia, kegiatan penanggulangan bencana dan PPKM. Sedangkan sisa realisasi pada tahun 2021 digunakan untuk kegiatan kelas ibu hamil, PMT balita 15 posyandu, PMT ibu hamil, PMT lansia, rehabilitas iposyandu, pembangunan Rutilahu, pembangunan TPT, instalasi komunikasi dan informatika, PPKM tingkat desa, bantuan BLT dan SDGS. Jadi, dari table tersebut dapat dilihat pada laporan realisasi dana desa pada sarana dan prasarana yang setiap tahunnya menurun dapat dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh desa terhadap masyarakat yang ada di desa sukaharja.

Implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2020 dan 2021 belum optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan ADD masih berorientasi pada pembangunan fisik sarana desa, belum mengarah kepada peningkatan kapasitas masyarakat desa dengan peningkatan sumber daya manusia masyarakat desa. Faktor-faktor yang menghambat penggunaan ADD sangat dominan dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia aparat pemerintah desa dan masyarakat desa, serta faktor sarana dan prasarana desa.

Berdasarkan hasil wawancara perangkat desa, kesalahan prioritas implementasi penggunaan alokasi dana desa terjadi karena terdapat isu-isu sosial ekonomi dan kesehatan yang memiliki efek signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat desa Sukaharja kecamatan Telukjambe Timur, sehingga perangkat desa lebih memprioritaskan pengadaan kegiatan yang dapat menunjang program peningkatan kesejahteraan soail ekonomi dan kesehatan masyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap efektifitas dan efisiensi implementasi penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana seharusnya pembangunan sarana dan prasana masyarakat dialokasikan sebesar 40%. Perubahan visi dan misi desa juga berpengaruh pada tingakt efektifitas dan efisiensi implementasi penggunaan alokasi dana desa dimana pada tahun 2020 dan 2021, visi misi desa lebih memprioritaskan pada kegiatan yang dapat menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, pengelolaan anggaran dana desa untuk pelayanan sarana dan prasarana masyarakat belum dapat terselesaikan dengan optimal, serta berdasarkan hasil wawancara tetua desa, ditemukan kurangnya akuntabilitas pemerintah desa, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan transparansi informasi terkait pelaksanaan kegiatan oleh pemerintahan desa sehingga pencapaian tujuan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan kurang efektif dan proses terkait pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masih sangat rendah karena terdapat minimnya partisipasi dan pengawasan masyarakat.

5. KESIMPULAN

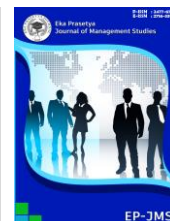
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penghambat implementasi penggunaan alokasi dana desa bertumpu pada kesalahan prioritas alokasi dana oleh perangkat desa yang memiliki visi misi yang tidak sejalan dengan alokasi dana desa untuk pembangunan fisik sarana dan parasana masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kemampuan sumber daya perangkat desa Sukarja berdampak negatif pada efektifitas dan efisiensi implementasi penggunaan alokasi dana desa.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



3. Prinsip akuntabilitas kurang dapat terpenuhi karena pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang terbuka dalam hal pengelolaan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola.
4. Implementasi alokasi penggunaan dana desa pada tahun 2020 dan 2021 masih kurang efektif dengan selisih dana surplus sebesar 40,2% dan 44,3%.
5. Efisiensi pengelolaan alokasi dana desa dalam pelayanan sarana dan prasarana masyarakat masih belum optimal karena akuntabilitas perangkat desa belum tercapai serta minimnya transparansi informasi kepada masyarakat yang berdampak negatif pada partisipasi dan pengawasan masyarakat.

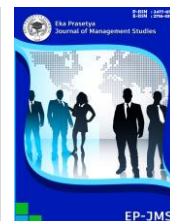
DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2017) *Perencanaan Pembangunan Desa (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Kencana.
- Ardiyani, A. R., Utami, E. R., Amanati, H. T., & Yusuf, A. M. (2021). Studi Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. Vol.4 No (2): 178-189.
- Diansari, R.E (2015) Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kleduk Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Jurnal*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Hariyanto, Slamet. Dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011-2014. *Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hendri, S. BS. DKK. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Sarana Dan Prasarana Terhadap Kinerja Ppengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten LombokTengah*. e-ISSN No. 2541-2850.
- Kemendes PDTT. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Jamaludin Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida
- Lili, M. A (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*. Vol 7 No (1).
- Nirmala, (2018). *Analisis Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Pelayanan Sarana Dan Prasarana Masyarakat Di Desa Kadingeh Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Prasetya ningtyas, F. Y., & Sulandari, S (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal of Public Policy and Management*. Vol 4 Nomor(7).
- Permatasari, E., Sopanah., Hasan, K (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *CIASTECH Universitas Widyagama Malang*. ISSN: 2622-1284 (media online).
- Pasuhuk, D. D., Kaawoan, J., Pangemanan, S. E (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*. Vol 1 No (2).
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*. Vol. 5 No (1): 15-27.



Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Management Studies)



- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*. Vol. 6 No (1): 45-60.
- Siti Aisyah, N. (2019). *Analisis Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Cibunar Kecamatan Cibunar Kabupaten Garut*. Skripsi. Universitas Garut.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol 7 No (1): 1-23.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryani, D. (2021). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 11 No (1): 1-10.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *Ejournal pemerintahan integrative*,1(1):51-64.
- Tadanugi, I. N (2019). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*. Vol 12 No (1).